

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 146, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 72);
37. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

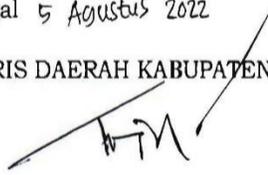
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 179

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 179 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023. Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk periode 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Ngawi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun. Renja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah:

- 1.2.1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 33 Prps. Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan;
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 1.2.6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- 1.2.7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 1.2.8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
- 1.2.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 1.2.10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 1.2.11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- 1.2.12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1.2.13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

- 1.2.14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 1.2.15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 1.2.16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- 1.2.17. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 1.2.18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak;
- 1.2.19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 1.2.20. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.21. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.2.22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 1.2.23. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.24. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- 1.2.25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.26. Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 1.2.27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 1.2.28. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 1.2.29. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 1.2.30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
- 1.2.31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
- 1.2.32. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
- 1.2.33. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 40);
- 1.2.34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
- 1.2.35. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah :

- a. Memberikan arah, kebijakan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama 1 tahun anggaran oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial.
- b. Sebagai Media Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien menuju terciptanya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
- c. Sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TahunLalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini menyajikan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi selama tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022.

Evaluasi Tahun 2021, anggaran Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebesar Rp. 4.262.955.146,00 yang terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.129.149.317,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,32% dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,86%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022 untuk tahun berjalan yakni tahun 2022 dengan usulan sebesar Rp. 10.612.843.231,00 terurai dalam 7 program, 16 kegiatan, 40 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau

minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Berikut adalah gambaran evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022
Kabupaten Ngawi

Nama SKPD : Dinas Sosial

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|--|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.06 1.06.01 01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon yang dibayar | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah rekening air yang dibayar | - | 36 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah rekening internet yang dibayar | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajak nya | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.005 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pembayaran honor | - | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan ATK | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang yang dicetak | - | 10012 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah barang yang digandakan | - | 40120 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.009 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar yang disediakan | - | 2544 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.010 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan yang disediakan | - | 1785 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah minuman yang disediakan | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.011 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/diikuti | - | 41 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 1.06.01 01.012 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadiri/diikuti | - | 192 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.002 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.003 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli/diadakan | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.004 | Pengadaan Meubelair | Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.006 | Pengadaan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang direhab | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.010 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.011 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.012 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.013 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Jumlah pemeliharaan mebeulair | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.016 | Pemeliharaan Peralatan Kerja | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja | - | 123 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.017 | Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | - | 298 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | - | 378 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase aparatur yang disiplin | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 03.002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan | - | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 03.004 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 05.002 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 05.003 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 06 | Program peningkatan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah | Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 06.001 | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD | Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu | - | 13 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah dokumen Laporan kinerja OPD yang disusun Tepat waktu | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 06.006 | Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD | Jumlah laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 15 | Program Penanganan Fakir Miskin | Jumlah fakir miskin yang diberdayakan | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 15.001 | Penanganan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan | Jumlah data fakmis yang terbaru | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah Fakir miskin yang menindaklanjuti hasil bimbingan sosial dan ketrampilan | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah penerima BPNT yang telah menggunakan e-warung | - | 94487 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16 | Program Rehabilitasi Sosial | Jumlah PMKS menerima pelayanan rehabilitasi sosial | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16.001 | Penanganan Rehabilitasi Sosial bagi anak dan usia lanjut | Jumlah PMKS anak yang difasilitasi ke panti/yayasan/UPT/PSBR | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah kasus anak diselesaikan (ABH, AT, Balita/Anak korban kekerasan/adopsi, anak jalanan) | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta bimbingan sosial dan keterampilan anak | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah Lanjut Usia terlantar yang menerima bantuan permakanan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi ke panti/yayasan | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah lanjut usia terlantar/ miskin yang menerima bantuan | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16.002 | Penanganan Rehabilitasi Sosial bagi disabilitas | Jumlah disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas yang dibantu alat | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas mendapat bantuan | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas mendapat bantuan permakanan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas yang difasilitasi | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16.003 | Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang | Jumlah penjemputan, pengantaran dan bantuan bagi korban perdagangan orang, gepeng, anak jalanan, tuna sosial dll | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah Eks WBP mendapatkan bimbingan sosial dan keterampilan | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah rakor penanganan tuna sosial dan KPO yang dilaksanakan | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta sosialisasi | - | 150 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 1.06.01 16.004 | Pengelolaan Shelter | Jumlah orang yang memanfaatkan shelter/penampungan/rumah aman | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | cakupan penerima bantuan sosial yang tepat sasaran | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17.001 | Perlindungan Sosial Korban Bencana alam | Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah sukarelawan kebencanaan kategori terampil | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah korban bencana alam yang mendapat permakanan (dapur umum) | - | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17.002 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial | Jumlah peserta sosialisasi | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah orang terlantar yang menerima bantuan sosial | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
| | | Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17.003 | Fasilitasi Jaminan Sosial Keluarga | Jumlah Pendamping Sosial PKH yang menindak lanjuti hasil Bimtek P2K2 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menindak lanjuti hasil Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/FDS | - | 380 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah hasil koordinasi Tim Pelaksana PKH yang ditindaklanjuti | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 18 | Program Pemberdayaan Sosial | Jumlah PSKS aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 18.001 | Pemberdayaan Sosial Perorangan, Kelompok dan Masyarakat | Jumlah peserta yang menindak lanjuti bimtek bagi PSM (pendamping sosial masyarakat) | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta yang menindak lanjuti Hasil bimbingan sosial dan ketrampilan bagi karang taruna | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 18.002 | Fasilitasi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial | Jumlah even Hari kesetiakawanan Sosial dilaksanakan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta Karang Taruna yang menindaklanjuti hasil BIMTEK | - | 76 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta sarasehan nilai- nilai Kepahlawanan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|------|
| 1.6 1.6.1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun | 100% | - | 100,00% | 99,32% | 99,32 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.01.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun | 20 Dokumen | - | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun | 70 Dokumen | - | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100 | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.01.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun | 55 Dokumen | - | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100 | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 100% | - | 100,00% | 98,34% | 98,34 | 100,00% | 100,00% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | 130 Dokumen | - | - | - | - | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 100% |
| | | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 6163 Kali | - | 936 Kali | 874 Kali | 93,38 | 1040 Kali | 1040 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.02.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 6 Dokumen | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.02.7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun | 288 Laporan | - | 48 Laporan | 48 Laporan | 100 | 48 Laporan | 48 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|---|------------|------------|-----|------------|------------|------|
| | | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | 12 Laporan | - | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | 100 | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.05.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/ diadakan | 744 Meter | - | - | - | - | 114 Meter | 114 Meter | 100% |
| | | Jumlah pakaian batik yang dibeli/ diadakan | 82 Potong | - | - | - | - | 38 Potong | 38 Potong | 100% |
| | | Jumlah atribut pakaian yang dibeli/ diadakan | 208 Buah | - | - | - | - | 38 Buah | 38 Buah | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan yang disediakan | 9942 Kotak | - | 1948 Kotak | 1948 Kotak | 100 | 1550 Kotak | 1550 Kotak | 100% |
| | | Jumlah minuman yang disediakan | 300 Dus | - | 50 Dus | 50 Dus | 100 | 50 Dus | 50 Dus | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------|---|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
| 1.6 1.6.1 1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang yang dicetak | 16800 Lembar | - | 2800 Lembar | 2800 Lembar | 100 | 2800 Lembar | 2800 Lembar | 100% |
| | | Jumlah barang yang digandakan | 145098 Lembar | - | 24183 Lembar | 24183 Lembar | 100 | 24183 Lembar | 24183 Lembar | 100% |
| | | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | 212 Kali | - | - | - | - | 21 kali | 21 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | - | - | 32 Kali | 32 Kali | 100 | - | - | 100% |
| | | Jumlah surat kabar yang disediakan | 15264 Eksemplar | - | 2544 Eksemplar | 2544 Eksemplar | 100 | 2544 Eksemplar | 2544 Eksemplar | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti | 372 kali | - | 30 Kali | 30 Kali | 100 | 57 kali | 57 kali | 100% |
| | | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/diikuti | 510 Kali | - | 53 Kali | 53 Kali | 100 | 70 kali | 70 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.07.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan | 7 Unit | - | - | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.07.5 | Pengadaan Mebel | Jumlah meubelair yang diadakan | 96 Unit | - | - | - | - | 23 Unit | 23 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.07.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | 34 Unit | - | 3 Unit | 3 Unit | 100 | 13 Unit | 13 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------|
| 1.6 1.6.1 1.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan | 13 Unit | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 1 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | - | 100,00% | 98,96% | 98,96 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon yang dibayar | 72 Rekening | - | 12 Rekening | 12 Rekening | 100 | 12 Rekening | 12 Rekening | 100% |
| | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | 288 Rekening | - | 48 Rekening | 48 Rekening | 100 | 48 Rekening | 48 Rekening | 100% |
| | | Jumlah rekening air yang dibayar | 216 Rekening | - | 36 Rekening | 36 Rekening | 100 | 36 Rekening | 36 Rekening | 100% |
| | | Jumlah rekening internet yang dibayar | 216 Rekening | - | 36 Rekening | 36 Rekening | 100 | 36 Rekening | 36 Rekening | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.08.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | 720 Buah | - | 100 Buah | 100 Buah | 100 | 59 Buah | 59 Buah | 100% |
| | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | 2520 Buah | - | 369 Buah | 369 Buah | 100 | 137 Buah | 137 Buah | 100% |
| | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | 288 Kali | - | 48 Kali | 48 Kali | 100 | 48 Kali | 48 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran honor | 504 Kali | - | 66 Kali | 66 Kali | 91,67 | 84 Kali | 84 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | 100% | - | 100,00% | 98,81% | 98,81 | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------|---|----------|----------|-------|----------|----------|------|
| 1.6 1.6.1 1.2.09.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan | 72 Kali | - | 12 Kali | 12 Kali | 100 | 12 Kali | 12 Kali | 100% |
| | | Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya | 1 Unit | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 210 Kali | - | 35 Kali | 35 Kali | 100 | 60 kali | 60 kali | 100% |
| | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya | 12 Unit | - | 12 Unit | 11 Unit | 91,67 | 12 Unit | 12 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah pemeliharaan mebeulair | 90 Kali | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kerja yang dipelihara | 984 Kali | - | 164 Kali | 164 Kali | 100 | 215 kali | 215 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 1290 M2 | - | 175 m2 | 175 m2 | 100 | 190 M2 | 190 M2 | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 30 Kali | 30 Kali | 100 | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | 70% | - | 50% | 50% | 100% | 55% | 55% | 100% |
| 1.6 1.6.1 2 2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|------------------|---|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| 1.6 1.6.1 2 2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah perusahaan yang mengikuti Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial | 44 Perusahaan | - | - | - | - | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 100% |
| 1.6 1.6.1 2 2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang menindaklanjuti pemberdayaan | 214 PSKS | - | 89 PSKS | 89 PSKS | 150 | 100 PSKS | 100 PSKS | 100% |
| 1.6 1.6.1 2.2.03.1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan | - | - | 60 PSM | 60 PSM | 100 | - | - | 100% |
| | | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan | 360 Orang | - | - | - | - | 41 PSM | 41 PSM | 100% |
| | | Jumlah IPSM (Ikatan PSM) difasilitasi | 30 IPSM | - | - | - | - | 1 IPSM | 1 IPSM | 100% |
| | | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 2.2.03.2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang menerima peningkatan kemampuan | 19 TKSK | - | 19 TKSK | 19 TKSK | 100 | 19 TKSK | 19 TKSK | 100% |
| 1.6 1.6.1 2.2.03.4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang menerima kemampuan | - | - | 3 Karang Taruna | 9 Karang Taruna | 300 | - | - | 100% |
| | | Jumlah pelayanan lembaga bidang kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kualitasnya | 42 Karang Taruna | - | - | - | - | 1 Karang Taruna | 1 Karang Taruna | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|---|---------|---------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | | Jumlah FK Kartar yang difasilitasi | - | - | - | - | - | 4 Karang Taruna | 4 Karang Taruna | 100% |
| | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 15 Lembaga | - | - | - | - | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 16 Kali | - | - | - | - | 4 kali | 4 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 2.2.03.5 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menerima peningkatan kemampuan | - | - | 1 LK3 | 1 LK3 | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menerima penguatan | 1 LK3 | - | - | - | - | 1 LK3 | 1 LK3 | 100% |
| 1.6 1.6.1 3 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 3 2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi Kabupaten | 50 Orang | - | 5 Orang | 5 Orang | 100 | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 3.2.01.1 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi Kabupaten ke desa/ kelurahan asal | | - | 5 Orang | 5 Orang | 100 | 10 Orang | 10 Orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------|---|-----------|-----------|-------|------------|------------|------|
| 1.6 1.6.1 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 100% | - | 100 | 100 | 100 | 55% | 55% | 100% |
| 1.6 1.6.1 4 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima pelayanan sosial | - | - | 516 Orang | 496 Orang | 96,12 | - | - | - |
| | | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1198 Orang | - | - | - | - | 1198 Orang | 1198 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan permakanan | - | - | 133 Orang | 133 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 1485 Orang | - | - | - | - | 105 Orang | 105 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan alat bantu | - | - | 18 Orang | 18 Orang | 100 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|---|-----------|-----------|-----|----------|----------|------|
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | 367 Orang | - | - | - | - | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| | | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter | 6 Unit | - | - | - | - | 6 Unit | 6 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah PMKS/PPKS Disabilitas menerima bantuan | - | - | 115 Orang | 115 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah PMKS/PPKS Lansia menerima bantuan | - | - | 135 Orang | 135 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 1201 Orang | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---|---|---|----------|----------|------|
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | 840 Orang | - | - | - | - | 20 orang | 20 orang | 100% |
| | | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 10 Kali | - | - | - | - | 10 kali | 10 kali | 100% |
| | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | - | - | - | - | 0% | 0% | - |
| | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | - | - | - | - | 0% | 0% | - |
| | | Jumlah Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | 50 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Persentase Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | - | - | - | - | 0% | 0% | - |
| | | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | 1 Lokasi | - | - | - | - | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|-----------|---|----------|----------|-----|----------|----------|------|
| | | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah | 1 Orang | - | - | - | - | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 20 Kali | - | - | - | - | 4 kali | 4 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.6 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan | - | - | 25 Orang | 25 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 402 Orang | - | - | - | - | 60 Orang | 60 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan | - | - | 20 Orang | 20 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | 550 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | - | - | - | - | - | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4 2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar Panti Sosial | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 1198 Orang | - | - | - | - | 1198 Orang | 1198 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4 2.02.14 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Kemitraan pelayanan rehabilitasi sosial di fasilitasi | 55 Kali | - | - | - | - | 3 kali | 3 kali | 100% |
| | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | 1 Data | - | - | - | - | 1 data | 1 data | 100% |
| | | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM | 1 Data | - | - | - | - | 1 data | 1 data | 100% |
| | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 5 Lembaga | - | - | - | - | 1 lembaga | 1 lembaga | 100% |
| 1.6 1.6.1 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 70% | - | 43.000 KPM | 45.155 KPM | 105% | 50% | 50% | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------|---|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|------|
| 1.6 1.6.1 5 2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data fakmis yang terbarukan | - | - | 1 Data | 1 Data | 100 | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 5.2.02.1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data fakir miskin yang terbarukan | - | - | 1 Database | 1 Database | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah fakir miskin yang menindaklanjuti hasil bimbingan sosial dan ketrampilan | - | - | 50 KPM | 50 KPM | 100 | - | - | - |
| | | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 70% | - | - | - | - | 50% | 50% | 100% |
| | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | 1 Data | - | - | - | - | 1 Data | 1 Data | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 20 Kali | - | - | - | - | 4 Kali | 4 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 5.2.02.3 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah SDM PKH yang menangani KPM PKH | - | - | 152 SDM PKH | 152 SDM PKH | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat | 43000 KPM | - | - | - | - | 46.334 KPM | 46.334 KPM | 100% |
| | | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 SDM PKH | - | - | - | - | 146 SDM PKH | 146 SDM PKH | 100% |
| | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | 5500 KPM | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------|---|-----------|-----------|-------|------------|------------|------|
| | | Jumlah KPM PKH yang menindaklanjuti Bimtek Wira Usaha | 25 Orang | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 100% |
| | | Jumlah KPM PKH yang memperoleh P2K2 | 760 KPM | - | - | - | - | 46.334 KPM | 46.334 KPM | 100% |
| | | Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti | 95 Laporan | - | - | - | - | 19 Laporan | 19 Laporan | 100% |
| | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | 200 Orang | - | - | - | - | 200 Orang | 200 Orang | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 40 Orang | - | - | - | - | 8 kali | 8 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 5.2.02.4 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Fakir Miskin mendapatkan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif | 625 Orang | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase penanganan bencana | 100% | - | 869 Orang | 270 Orang | 68,88 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 6 2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | 100% | - | 869 Orang | 270 Orang | 37,76 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 6.2.01.1 | Penyediaan Makanan | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penyediaan makanan | - | - | 869 Orang | 270 Orang | 37,76 | - | - | - |
| | | Jumlah korban bencana Alam yang mendapatkan makanan | 7000 Orang | - | - | - | - | 650 Orang | 650 Orang | 100% |
| | | Jumlah Paket Permakanan khusus bagi kelompok rentan | 50 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----------|---|----------|----------|-----|-----------|-----------|------|
| | | Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang dimiliki | 10 Lokasi | - | - | - | - | 9 Lokasi | 9 Lokasi | 100% |
| | | Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang | 800 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah Korban bencana yang menerima Pelayanan Dukungan sosial | 550 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | 50 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah Orang terlantar yang mendapatkan bantuan | 60 Orang | - | - | - | - | 25 orang | 25 orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 6 2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan | 40 Orang | - | 22 Orang | 22 Orang | 100 | 33 Orang | 33 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 6.2.02.2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 31 Kali | - | 3 Kali | 3 Kali | 100 | 3 Kali | 3 Kali | 100 |
| | | Jumlah warga masyarakat rawan bencana yang mendapatkan Kesiapsiagaan dan mitigasi (KSB) | 450 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah kelompok Masyarakat dilokasi rawan Bencana yang mendapatkan pencegahan konflik | 50 Pokmas | - | - | - | - | 50 Pokmas | 50 Pokmas | 100% |
| | | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap di Tugaskan | 3 Orang | - | - | - | - | 3 Orang | 3 Orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|----------|---|---|---|---|----------|----------|------|
| | | Jumlah Pekerja Profesional/ Tenaga Kesos/ atau Relawan Sosial yang tersedia | 36 Orang | - | - | - | - | 36 Orang | 36 Orang | 100% |
| 1.6.1.6.1.7 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 1.6.1.6.1.7.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1 Lokasi | - | - | - | - | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100% |
| 1.6.1.6.1.7.2.01.2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | 144 Kali | - | - | - | - | 24 Kali | 24 Kali | 100% |
| | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | 12 Kali | - | - | - | - | 2 Kali | 2 Kali | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe A maka Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
- f. Bidang Penanganan Bencana dan Migran
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Tipe A.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan yang diselenggarakan adalah melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Sosial dan tugas lain yang diberikan Bupati, yang sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ngawi melalui Sekretaris Daerah kabupaten Ngawi.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu-isu strategis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi adalah :

- a. Kualitas manajemen, profesionalisme, dan proporsionalisme pelayanan kesejahteraan sosial merupakan prioritas utama yang mendesak ditingkatkan.

Hal ini disebabkan belum adanya tenaga pekerja sosial fungsional di Kabupaten Ngawi, kurang memadainya pelayanan oleh organisasi sosial, serta penempatan aparatur yang lebih proporsional sesuai dengan latar belakang dan atau terampil dalam penanganan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi dalam manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dan manajemen program belum terlaksana secara kreatif, inovatif, sistematis dan kurang terintegrasi, baik internal Dinas Sosial bidang kesejahteraan sosial maupun koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan Kementrian Sosial RI.

- b. Kurang optimalnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar.

Kemampuan penanganan PMKS di Kabupaten Ngawi masih kurang optimal seperti dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mendasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/HUK/2008 yang menargetkan 80 % dalam kurun 7 tahun mulai 2008 s/d 2016.

- c. Persepsi masyarakat terhadap penanganan bidang sosial yang berorientasi pada pemberian bantuan saja dan merupakan kewajiban pemerintah.

Persepsi demikian kiranya dapat menghambat pembangunan bidang sosial, karena menempatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah saja.

Oleh karena itu paradigma pembangunan dengan memberikan peran aktif masyarakat lebih proporsional diharapkan mampu membuat hasil pembangunan lebih baik, karena tanggung jawab sosial (*social responsibility*) secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

d. Semakin terbukanya media informasi

Sangat mudahnya akses masyarakat dalam mendapatkan dan mengusulkan bantuan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kesiapan Dinas Sosial dalam mengantisipasi/ memberikan pelayanan lebih baik.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Bab 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|----|--|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 23.302.144.312,49 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 23.302.144.312,49 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-------------------|------------------|---|-----------------|--|-------------------|------------------|--|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 5.579.631.312,49 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 5.579.631.312,49 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | 100% | 55.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | 100% | 55.000.000,00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun | 13 dokume n | 50.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun | 13 dokum en | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun | 4 dokume n | | | | Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun | 4 dokum en | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Jumlah laporan kinerja PD yang disusun | 6 laporan | 5.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Jumlah laporan kinerja PD yang disusun | 6 laporan | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-------------------|------------------|---|-----------------|--|-------------------|------------------|--|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 100% | 3.830.460.312,49 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 100% | 3.830.460.312,49 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Sosial | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1170 kali | 3.820.460.312,49 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Sosial | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1170 kali | 3.820.460.312,49 | |
| | | | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | 26 dokume n | | | | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | 26 dokum en | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Sosial | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1 laporan | 5.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Sosial | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1 laporan | 5.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan | Dinas Sosial | Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun | 48 laporan | 5.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan | Dinas Sosial | Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun | 48 laporan | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|-----------|----------------|--|--------------|---|-----------|----------------|--|
| | Semesteran SKPD | | | | | Semesteran SKPD | | | | | |
| | | | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | 2 laporan | | | | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | 2 laporan | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | 100% | 156.100.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | 100% | 156.100.000,00 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Sosial | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/ diadakan | 126 meter | 25.000.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Sosial | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/ diadakan | 126 meter | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pakaian Olahraga yang dibeli/ diadakan | 42 stel | | | | Jumlah pakaian Olahraga yang dibeli/ diadakan | 42 stel | | |
| | | | Jumlah atribut pakaian yang dibeli/ diadakan | 42 buah | | | | Jumlah atribut pakaian yang dibeli/ diadakan | 42 buah | | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi | Dinas Sosial | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | 42 orang | 131.100.000,00 | Bimbingan Teknis Implementasi | Dinas Sosial | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | 42 orang | 131.100.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------------|----------------|--|--------------|--|------------|----------------|--|
| | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun | 100% | 322.000.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun | 100% | 322.000.000,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Sosial | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | 100% | 10.000.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Sosial | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | 100% | 10.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Sosial | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 60.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Sosial | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 60.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Sosial | Jumlah makanan yang disediakan | 1700 kotak | 42.000.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Sosial | Jumlah makanan yang disediakan | 1700 kotak | 42.000.000,00 | |
| | | | Jumlah minuman yang disediakan | 50 dos | | | | Jumlah minuman yang disediakan | 50 dos | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-----------------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------------|----------------|--|
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dinas Sosial | Jumlah barang yang dicetak | 2800 lembar | 85.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dinas Sosial | Jumlah barang yang dicetak | 2800 lembar | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah barang yang digandakan | 25000 lembar | | | | Jumlah barang yang digandakan | 25000 lembar | | |
| | | | Jumlah iklan/publikasi media cetak | 40 kali | | | | Jumlah iklan/publikasi media cetak | 40 kali | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Dinas Sosial | Jumlah surat kabar yang disediakan | 2544 eksempl ar | 15.000.000,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Dinas Sosial | Jumlah surat kabar yang disediakan | 2544 eksemp lar | 15.000.000,00 | |
| | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Sosial | Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti | 60 kali | 110.000.000,00 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Sosial | Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti | 60 kali | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/diikuti | 80 kali | | | | Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/diikuti | 80 kali | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|---------|----------------|---|--------------|---|---------|----------------|--|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun | 100 | 572.471.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun | 100 | 572.471.000,00 | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan | 1 unit | 390.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan | 1 unit | 390.000.000,00 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan | 2 unit | 44.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan | 2 unit | 44.000.000,00 | |
| | Pengadaan Mebel | Dinas Sosial | Jumlah meubelair yang diadakan | 15 unit | 10.000.000,00 | Pengadaan Mebel | Dinas Sosial | Jumlah meubelair yang diadakan | 15 unit | 10.000.000,00 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Sosial | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | 14 unit | 79.971.000,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Sosial | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | 14 unit | 79.971.000,00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Dinas Sosial | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan | 2 unit | 8.500.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Dinas Sosial | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan | 2 unit | 8.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|----------------|--|--------------|--|--------------|----------------|--|
| | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | bangunan lainnya yang diadakan | | | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | bangunan lainnya yang diadakan | | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun | 15 m2 | 40.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun | 15 m2 | 40.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 293.000.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 293.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Sosial | Jumlah rekening telepon yang dibayar | 12 rekenin g | 100.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Sosial | Jumlah rekening telepon yang dibayar | 12 rekenin g | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | 60 rekenin g | | | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | 60 rekenin g | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--|---|---------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | Jumlah rekening air yang dibayar | 36 rekening | | | | Jumlah rekening air yang dibayar | 36 rekening | | |
| | | | Jumlah rekening internet yang dibayar | 36 rekening | | | | Jumlah rekening internet yang dibayar | 36 rekening | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | 120 buah | 73.000.000,00 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | 120 buah | 73.000.000,00 | |
| | | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | 420 buah | | | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | 420 buah | | |
| | | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | 48 kali | | | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | 48 kali | | |
| | | | Jumlah pembayaran jasa operator | 12 kali | | | | Jumlah pembayaran jasa operator | 12 kali | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Sosial | Jumlah pembayaran honor | 84 kali | 120.000.000,00 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran honor | 84 kali | 120.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---------|----------------|--|-----------------|--|---------|----------------|--|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | 100% | 350.600.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | 100% | 350.600.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan dinas/ jabatan yang dibayar pajaknya | 1 unit | 31.500.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan dinas/ jabatan yang dibayar pajaknya | 1 unit | 31.500.000,00 | |
| | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan | 12 kali | | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan | 12 kali | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya | 12 unit | 70.900.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | Dinas Sosial | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya | 12 unit | 70.900.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--------------------|------------------|--|--------------|--|--------------------|------------------|--|
| | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | |
| | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 35 kali | | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 35 kali | | |
| | Pemeliharaan Mebel | Dinas Sosial | Jumlah pemeliharaan mebeulair | 15 kali | 3.000.000,00 | Pemeliharaan Mebel | Dinas Sosial | Jumlah pemeliharaan mebeulair | 15 kali | 3.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Sosial | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja | 164 kali | 28.200.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Sosial | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja | 164 kali | 28.200.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas Sosial | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 225 m ² | 217.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas Sosial | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 225 m ² | 217.000.000,00 | |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | 55% | 1.461.242.300,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | 55% | 1.461.242.300,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---------------|------------------|--|-----------------|--|---------------|------------------|--|
| | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | 100% | 40.000.000,00 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | 100% | 40.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Kabupaten Ngawi | Jumlah perusahaan yang mengikuti Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial | 10 perusahaan | 40.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Kabupaten Ngawi | Jumlah perusahaan yang mengikuti Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial | 10 perusahaan | 40.000.000,00 | |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas | 159 PSKS | 1.421.242.300,00 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas | 159 PSKS | 1.421.242.300,00 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan | Kabupaten Ngawi | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan | 60 orang | 381.242.300,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan | Kabupaten Ngawi | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan | 60 orang | 381.242.300,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-----------------------|----------------|--|------------------------|---|-----------------------|----------------|--|
| | Kabupaten/ Kota | | | | | Kabupaten/ Kota | | | | | |
| | | | Jumlah IPSM (Ikatan PSM) difasilitasi | 6 IPSM | | | | Jumlah IPSM (Ikatan PSM) difasilitasi | 6 IPSM | | |
| | | | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | 30 Orang | | | | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | 30 Orang | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Kabup aten Ngawi | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ditingkatkan kapasitasnya | 19 TKSK | 320.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Kabupa ten Ngawi | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ditingkatkan kapasitasnya | 19 TKSK | 320.000.000,00 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan | Kabup aten Ngawi | Jumlah pelayanan lembaga bidang kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kualitasnya | 5 Karang Taruna | 700.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan | Kabupa ten Ngawi | Jumlah pelayanan lembaga bidang kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kualitasnya | 5 Karang Taruna | 700.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-----------|---------------|--|-----------------|---|-----------|---------------|--|
| | Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | |
| | | | Jumlah FK Kartar yang di fasilitasi | 1 FKT | | | | Jumlah FK Kartar yang di fasilitasi | 1 FKT | | |
| | | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 3 lembaga | | | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 3 lembaga | | |
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | |
| | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi | Kabupaten Ngawi | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menerima penguatan | 1 LK3 | 20.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi | Kabupaten Ngawi | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menerima penguatan | 1 LK3 | 20.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|---------------|---|--|---|------|---------------|--|
| | Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani | 100% | 40.000.000,00 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani | 100% | 40.000.000,00 | |
| | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | 100% | 40.000.000,00 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | 100% | 40.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|------------|------------------|--|-----------------|--|------------|------------------|--|
| | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Kabupaten Ngawi | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi Kabupaten ke desa/ kelurahan asal | 10 Orang | 40.000.000,00 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Kabupaten Ngawi | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi Kabupaten ke desa/ kelurahan asal | 10 Orang | 40.000.000,00 | |
| 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 55% | 2.046.600.000,00 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 55% | 2.046.600.000,00 | |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1034 orang | 1.927.746.000,00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1034 orang | 1.927.746.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-----------|----------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------|----------------|--|
| | Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | |
| | Penyediaan Permakanan | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 255 orang | 358.239.000,00 | Penyediaan Permakanan | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 255 orang | 358.239.000,00 | |
| | Penyediaan Sandang | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang | 27 orang | 8.735.000,00 | Penyediaan Sandang | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang | 27 orang | 8.735.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-----------|------------------|--|-----------------|--|-----------|------------------|--|
| | Penyediaan Alat Bantu | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | 62 orang | 222.308.500,00 | Penyediaan Alat Bantu | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | 62 orang | 222.308.500,00 | |
| | | | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter | 6 unit | | | | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter | 6 unit | | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 250 orang | 1.138.969.500,00 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 250 orang | 1.138.969.500,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|--|--|---|-----------|--|--|
| | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | 150 orang | | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | 150 orang | | |
| | | | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 10 kali | | | | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 10 kali | | |
| | | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang | 80% | | | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang | 80% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|--|--|--|---|-------------|--|--|
| | | | terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | | | | | terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | | | |
| | | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | | | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | | |
| | | | Jumlah Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | 20 orang | | | | Jumlah Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | 20 orang | | |
| | | | Persentase Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | | | | Persentase Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | | |
| | | | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang | 1 lokasi | | | | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang | 1 lokasi | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|----------|---------------|---|-----------------|--|----------|---------------|--|
| | | | dimiliki sesuai standar | | | | | dimiliki sesuai standar | | | |
| | | | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah | 1 orang | | | | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah | 1 orang | | |
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 8 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 8 kali | | |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 60 orang | 41.975.000,00 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 60 orang | 41.975.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-----------|----------------|--|-----------------|---|-----------|----------------|--|
| | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | 10 orang | 16.600.000,00 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | 10 orang | 16.600.000,00 | |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 10 orang | 16.600.000,00 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 10 orang | 16.600.000,00 | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut | 100 orang | 124.319.000,00 | Pemberian Layanan Rujukan | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut | 100 orang | 124.319.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---------------|----------------|---|------------------------|--|---------------|----------------|--|
| | | | usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | | | | | usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | | | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar Panti Sosial | | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 1078 orang | 118.854.000,00 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar Panti Sosial | | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 1078 orang | 118.854.000,00 | |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Kabup aten Ngawi | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | 1 tim | 53.238.000,00 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Kabupa ten Ngawi | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | 1 tim | 53.238.000,00 | |
| | | | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki | | | | | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki | | | |
| | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Kabup aten Ngawi | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia | 20 paket | 12.880.000,00 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Kabupa ten Ngawi | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia | 20 paket | 12.880.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|----------|---------------|--|-----------------|---|----------|---------------|--|
| | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | 20 orang | | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | 20 orang | | |
| | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | 10 orang | 17.800.000,00 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Kabupaten Ngawi | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | 10 orang | 17.800.000,00 | |
| | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi | Kabupaten Ngawi | Jumlah Kemitraan pelayanan rehabilitasi sosial di fasilitasi | 10 kali | 34.936.000,00 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi | Kabupaten Ngawi | Jumlah Kemitraan pelayanan rehabilitasi sosial di fasilitasi | 10 kali | 34.936.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------|-------------------|---------------------------------|--|---|-----------|-------------------|--|
| | Sosial Kabupaten/Ko ta | | | | | Sosial Kabupaten/Ko ta | | | | | |
| | | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | 1 data | | | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | 1 data | | |
| | | | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM | 1 data | | | | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM | 1 data | | |
| | | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 1 lembaga | | | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 1 lembaga | | |
| 5 | PROGRAM PERLINDUNG AN DAN | | Cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 55% | 13.474.663.000,00 | PROGRAM PERLINDUNG AN DAN | | Cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 55% | 13.474.663.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|------------|-------------------|--|-----------------|--|------------|-------------------|--|
| | JAMINAN SOSIAL | | | | | JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah data fakmis yang terbarukan | 1 data | 13.474.663.000,00 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah data fakmis yang terbarukan | 1 data | 13.474.663.000,00 | |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 55% | 550.000.000,00 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 55% | 550.000.000,00 | |
| | | | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 1 Database | | | | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 1 Database | | |
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-------------|-------------------|--|-----------------|---|-------------|-------------------|--|
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Kabupaten Ngawi | Jumlah Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat | 43.000 KPM | 12.539.663.000,00 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Kabupaten Ngawi | Jumlah Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat | 43.000 KPM | 12.539.663.000,00 | |
| | | | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 SDM PKH | | | | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 SDM PKH | | |
| | | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | 5.500 KPM | | | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | 5.500 KPM | | |
| | | | Jumlah KPM PKH yang memperoleh P2K2 | 760 KPM PKH | | | | Jumlah KPM PKH yang memperoleh P2K2 | 760 KPM PKH | | |
| | | | Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti | 19 Laporan | | | | Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti | 19 Laporan | | |
| | | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | 75 orang | | | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | 75 orang | | |
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga | 4 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga | 4 kali | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|------------|----------------|--|-----------------|--|------------|----------------|--|
| | | | kondusifitas daerah | | | | | kondusifitas daerah | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kabupaten Ngawi | Jumlah Fakir Miskin mendapatkan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif | 125 orang | 385.000.000,00 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kabupaten Ngawi | Jumlah Fakir Miskin mendapatkan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif | 125 orang | 385.000.000,00 | |
| | | | Jumlah KPM PKH yang menindaklanjuti Bimtek Wira Usaha | 25 orang | | | | Jumlah KPM PKH yang menindaklanjuti Bimtek Wira Usaha | 25 orang | | |
| 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | Persentase penanganan bencana | 100% | 561.250.000,00 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | Persentase penanganan bencana | 100% | 561.250.000,00 | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | 100% | 311.250.000,00 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | 100% | 311.250.000,00 | |
| | Penyediaan Makanan | Kabupaten Ngawi | Jumlah korban bencana Alam yang mendapatkan makanan | 1500 orang | 250.000.000,00 | Penyediaan Makanan | Kabupaten Ngawi | Jumlah korban bencana Alam yang mendapatkan makanan | 1500 orang | 250.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-----------|---------------|--|-----------------|---|-----------|---------------|--|
| | | | Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang dimiliki | 10 lokasi | | | | Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang dimiliki | 10 lokasi | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang | 150 orang | | | | Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang | 150 orang | | |
| | | | Jumlah Korban bencana yang menerima Pelayanan Dukungan sosial | 100 orang | | | | Jumlah Korban bencana yang menerima Pelayanan Dukungan sosial | 100 orang | | |
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | |
| | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | Kabupaten Ngawi | Jumlah Paket Permakanan khusus bagi kelompok rentan | 50 paket | 61.250.000,00 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | Kabupaten Ngawi | Jumlah Paket Permakanan khusus bagi kelompok rentan | 50 paket | 61.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan | 50 orang | | | | Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan | 50 orang | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|----------------|---|--|---|--------------|----------------|--|
| | | | Bantuan Perlindungan Sosial | | | | | Bantuan Perlindungan Sosial | | | |
| | | | Jumlah Orang terlantar yang mendapatkan bantuan | 60 orang | | | | Jumlah Orang terlantar yang mendapatkan bantuan | 60 orang | | |
| | | | Jumlah kelompok Masyarakat dilokasi rawan Bencana yang mendapatkan pencegahan konflik | 50 pokmas | | | | Jumlah kelompok Masyarakat dilokasi rawan Bencana yang mendapatkan pencegahan konflik | 50 pokmas | | |
| | | | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap di Tugaskan | 3 orang | | | | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap di Tugaskan | 3 orang | | |
| | Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota | | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan | 36 orang | 250.000.000,00 | Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota | | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan | 36 orang | 250.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-----------|----------------|--|-----------------|---|-----------|----------------|--|
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kabupaten Ngawi | Jumlah warga masyarakat rawan bencana yang mendapatkan Kesiapsiagaan dan mitigasi (KSB) | 100 orang | 250.000.000,00 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kabupaten Ngawi | Jumlah warga masyarakat rawan bencana yang mendapatkan Kesiapsiagaan dan mitigasi (KSB) | 100 orang | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pekerja Profesional/ Tenaga Kesos/ atau Relawan Sosial yang tersedia | 40 orang | | | | Jumlah Pekerja Profesional/ Tenaga Kesos/ atau Relawan Sosial yang tersedia | 40 orang | | |
| | | | Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 6 kali | | | | Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 6 kali | | |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 100% | 138.757.700,00 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 100% | 138.757.700,00 | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional | | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1 TMP | 138.757.700,00 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional | | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1 TMP | 138.757.700,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---------|----------------|---|------------------------|--|---------|----------------|--|
| | Kabupaten/ Kota | | | | | Kabupaten/ Kota | | | | | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Kabup aten Ngawi | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | 24 kali | 138.757.700,00 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Kabupa ten Ngawi | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | 24 kali | 138.757.700,00 | |
| | | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | 2 kali | | | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | 2 kali | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut saat ini diakomodir melalui *aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang diampu oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Bab 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Ngawi

Nama SKPD : Dinas Sosial

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bantuan Kursi Roda bagi warga miskin | Desa Kalang Kecamatan Pitu | 1 Unit | 6.500.000 | |
| 2 | Bantuan Kursi Roda bagi warga miskin | Desa Gendol Kecamatan Sine | 25 Unit | 65.000.000 | |
| 3 | Bantuan Kursi Roda bagi warga miskin | Desa Watualang Kecamatan Ngawi | 10 Unit | 26.000.000 | |
| 4 | Bantuan Kaki Palsu | Desa Padas Kecamatan Padas | 2 Unit | 6.000.000 | |
| 5 | Bantuan Kursi Roda bagi warga miskin | Desa Ngancar Kecamatan Pitu | 10 Unit | 26.000.000 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------|------------|--|
| 6 | Bantuan Kursi Roda bagi warga miskin | Desa Jagir Kecamatan Sine | 25 Unit | 65.000.000 | |
| 7 | Bantuan Kursi Roda bagi warga miskin | Desa Pitu Kecamatan Pitu | 10 Unit | 26.000.000 | |

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tabel T-VI.C.1 berikut ini :

Tabel T-VI.C.1

Identifikasi Kebijakan Nasional

| No | Kebijakan Nasional/ Provinsi | Sumber | Keterangan |
|----|---|---|------------|
| 1 | Program prioritas penanggulangan kemiskinan | Renstra K/L Kementrian Sosial RI | |
| 2 | Kegiatan prioritas peningkatan pelayanan jaminan sosial | Renstra K/L Kementrian Sosial RI | |
| 3 | Kegiatan prioritas peningkatan efektifitas bantuan pendidikan bagi anak sekolah | Renstra K/L Kementrian Sosial RI | |
| 4 | Kegiatan prioritas peningaktan efektifitas penyaluran bantuan pangan | Renstra K/L Kementrian Sosial RI | |
| 5 | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | |

| No | Kebijakan Nasional/ Provinsi | Sumber | Keterangan |
|----|--|---|------------|
| 6 | Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. | Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | |
| 7 | Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | |
| 8 | Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | |
| 9 | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | |

| No | Kebijakan Nasional/ Provinsi | Sumber | Keterangan |
|----|--|---|------------|
| 10 | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | |
| 11 | Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | |

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sasaran Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan pelayanan dasar sosial bagi PPKS.

Pertimbangan dalam perumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023 mendasarkan pada :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebagai Urusan Pelayanan Wajib Pelayanan Dasar.
2. Pencapaian IKU Perangkat Daerah
3. Penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Ngawi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Anggaran belanja yang terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu Belanja Langsung yang terdiri atas Program Urusan Wajib Pemerintahan Umum dan program lain yang merupakan Urusan Wajib Dinas Sosial. Rencana program dan kegiatan langsung yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi terdapat 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 23.302.144.312,49. yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|-----------------|---------------|-------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | | 100% | | 5.579.631.312,49 | | 100% | 5.579.631.312,49 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | | 100% | | 55.000.000,00 | | 100% | 55.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun | Dinas Sosial | 13 dokumen | APBD KAB | 50.000.000,00 | - | 13 dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun | | 4 dokumen | APBD KAB | | - | 4 dokumen | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kinerja PD yang disusun | Dinas Sosial | 6 laporan | APBD KAB | 5.000.000,00 | - | 6 laporan | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|-----------------|---------------|-------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | | 100% | | 3.830.460.312,49 | - | 100% | 3.830.460.312,49 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN | Dinas Sosial | 1170 kali | APBD KAB | 3.820.460.312,49 | - | 1170 kali | 3.820.460.312,49 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | | 26 dokumen | APBD KAB | | - | 26 dokumen | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | Dinas Sosial | 1 laporan | APBD KAB | 5.000.000,00 | - | 1 laporan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun | Dinas Sosial | 48 laporan | APBD KAB | 5.000.000,00 | - | 48 laporan | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|--------------|-----------|----------|----------------|---|-----------|----------------|--|
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | | 2 laporan | APBD KAB | | - | 2 laporan | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | | 100% | | 156.100.000,00 | - | 100% | 156.100.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/ diadakan | Dinas Sosial | 126 meter | APBD KAB | 25.000.000,00 | - | 126 meter | 25.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah pakaian Olahraga yang dibeli/ diadakan | | 42 stel | | | | 42 stel | | |
| | | | | | | Jumlah atribut pakaian yang dibeli/ diadakan | | 42 buah | APBD KAB | | - | 42 buah | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | Dinas Sosial | 42 orang | APBD KAB | 131.100.000,00 | - | 42 orang | 131.100.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan | | 100% | | 322.000.000,00 | - | 100% | 322.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|--------------|--------------|----------|---------------|---|--------------|---------------|--|
| | | | | | | administrasi umum dalam setahun | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | Dinas Sosial | 100% | APBD KAB | 10.000.000,00 | - | 100% | 10.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Dinas Sosial | 100% | APBD KAB | 60.000.000,00 | - | 100% | 60.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan yang disediakan | Dinas Sosial | 1700 kotak | APBD KAB | 42.000.000,00 | - | 1700 kotak | 42.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah minuman yang disediakan | | 50 dos | APBD KAB | | - | 50 dos | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah barang yang dicetak | Dinas Sosial | 2800 lembar | APBD KAB | 85.000.000,00 | - | 2800 lembar | 85.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah barang yang digandakan | | 25000 lembar | APBD KAB | | - | 25000 lembar | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|--------------|----------------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|
| | | | | | | Jumlah iklan/publikasi media cetak | | 40 kali | APBD KAB | | - | 40 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar yang disediakan | Dinas Sosial | 2544 eksemplar | APBD KAB | 15.000.000,00 | - | 2544 eksemplar | 15.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti | Dinas Sosial | 60 kali | | 110.000.000,00 | | 60 kali | 110.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/diikuti | | 80 kali | APBD KAB | | - | 80 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai | | 100 | | 572.471.000,00 | - | 100 | 572.471.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|---|-----------------|---------|-------------|----------------|---|---------|----------------|--|
| | | | | | | dengan kebutuhan dalam setahun | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan | Dinas Sosial | 1 unit | APBD KAB | 390.000.000,00 | - | 1 unit | 390.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan | Dinas Sosial | 2 unit | | 44.000.000,00 | | 2 unit | 44.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Mebel | Jumlah meubelair yang diadakan | Dinas Sosial | 15 unit | APBD KAB | 10.000.000,00 | - | 15 unit | 10.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | Dinas Sosial | 14 unit | APBD KAB | 79.971.000,00 | - | 14 unit | 79.971.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan | Dinas Sosial | 2 unit | | 8.500.000,00 | | 2 unit | 8.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|--------------|-------------|----------|----------------|---|-------------|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun | | 15 m2 | APBD KAB | 40.000.000,00 | - | 15 m2 | 40.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | | 100% | | 293.000.000,00 | - | 100% | 293.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon yang dibayar | Dinas Sosial | 12 rekening | | 100.000.000,00 | | 12 rekening | 100.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | | 60 rekening | | | | 60 rekening | | |
| | | | | | | Jumlah rekening air yang dibayar | | 36 rekening | APBD KAB | | - | 36 rekening | | |
| | | | | | | Jumlah rekening internet yang dibayar | | 36 rekening | | | | 36 rekening | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|--|--------------|----------|----------|----------------|---|----------|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | | 120 buah | APBD KAB | 73.000.000,00 | - | 120 buah | 73.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | | 420 buah | APBD KAB | | - | 420 buah | | |
| | | | | | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | | 48 kali | APBD KAB | | | 48 kali | | |
| | | | | | | Jumlah pembayaran jasa operator | | 12 kali | | | | 12 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran honor | Dinas Sosial | 84 kali | | 120.000.000,00 | | 84 kali | 120.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | | 100% | | 350.600.000,00 | - | 100% | 350.600.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|--------------|---------|----------|---------------|---|---------|---------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/ jabatan yang dibayar pajaknya | Dinas Sosial | 1 unit | APBD KAB | 31.500.000,00 | - | 1 unit | 31.500.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan | | 12 kali | | | | 12 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya | Dinas Sosial | 12 unit | APBD KAB | 70.900.000,00 | - | 12 unit | 70.900.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional | | 35 kali | APBD KAB | | - | 35 kali | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---|---------------------|------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah pemeliharaan mebeulair | Dinas Sosial | 15 kali | APBD KAB | 3.000.000,00 | - | 15 kali | 3.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja | Dinas Sosial | 164 kali | | 28.200.000,00 | | 164 kali | 28.200.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Luasan gedung kantor yang dipelihara | Dinas Sosial | 225 m ² | APBD KAB | 217.000.000,00 | - | 225 m ² | 217.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | | 55% | | 1.461.242.300,00 | | 55% | 1.461.242.300,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | | 100% | | 40.000.000,00 | | 100% | 40.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah perusahaan yang mengikuti Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial | Kabupate n Ngawi | 10 perusaha n | APBD KAB | 40.000.000,00 | | 10 perusaha n | 40.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|---------------------|----------|--|------------------|--|----------|------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas | | 159 PSKS | | 1.421.242.300,00 | | 159 PSKS | 1.421.242.300,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan | Kabupate n Ngawi | 60 orang | | 381.242.300,00 | | 60 orang | 381.242.300,00 | |
| | | | | | | Jumlah IPSM (Ikatan PSM) difasilitasi | | 6 IPSM | | | | 6 IPSM | | |
| | | | | | | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | | 30 Orang | | | | 30 Orang | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ditingkatkan kapasitasnya | Kabupate n Ngawi | 19 TKSK | | 320.000.000,00 | | 19 TKSK | 320.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|---|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-----------------|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah pelayanan lembaga bidang kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kualitasnya | Kabupaten Ngawi | 5 Karang Taruna | | 700.000.000,00 | | 5 Karang Taruna | 700.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah FK Kartar yang di fasilitasi | | 1 FKT | | | | 1 FKT | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | | 3 lembaga | | | | 3 lembaga | | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | | 4 kali | | | | 4 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Kabupaten Ngawi | 1 LK3 | | 20.000.000,00 | | 1 LK3 | 20.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|--|---------------------|----------|--|---------------|--|----------|---------------|--|
| | | | | | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | yang menerima penguatan | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani | | 100% | | 40.000.000,00 | | 100% | 40.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | | 100% | | 40.000.000,00 | | 100% | 40.000.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari | Kabupate n Ngawi | 10 Orang | | 40.000.000,00 | | 10 Orang | 40.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|--|--|------------|--|------------------|--|------------|------------------|--|
| | | | | | dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | titik debarkasi Kabupaten ke desa/ kelurahan asal | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 55% | | 2.046.600.000,00 | | 55% | 2.046.600.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1034 orang | | 1.927.746.000,00 | | 1034 orang | 1.927.746.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--------------------------|--|---------------------|-----------|--|----------------|--|-----------|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Permakanan | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | Kabupate n Ngawi | 255 orang | | 358.239.000,00 | | 255 orang | 358.239.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Sandang | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang | Kabupate n Ngawi | 27 orang | | 8.735.000,00 | | 27 orang | 8.735.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng | Kabupate n Ngawi | 62 orang | | 222.308.500,00 | | 62 orang | 222.308.500,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|-----------------|-----------|--|------------------|--|-----------|------------------|--|
| | | | | | | yang memanfaatkan alat bantu | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter | | 6 unit | | | | 6 unit | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | Kabupaten Ngawi | 250 orang | | 1.138.969.500,00 | | 250 orang | 1.138.969.500,00 | |
| | | | | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di | | 150 orang | | | | 150 orang | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | | 10 kali | | | | 10 kali | | |
| | | | | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | | 80% | | | | 80% | | |
| | | | | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan | | 80% | | | | 80% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|----------|--|
| | | | | | | dasarnya di luar panti | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | | 20 orang | | | | 20 orang | |
| | | | | | | Persentase Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | | 80% | | | | 80% | |
| | | | | | | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | | 1 lokasi | | | | 1 lokasi | |
| | | | | | | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah | | 1 orang | | | | 1 orang | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam | | 8 kali | | | | 8 kali | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|--|-----------------|----------|--|---------------|--|----------|---------------|--|
| | | | | | | rangka menjaga kondusifitas daerah | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | Kabupaten Ngawi | 60 orang | | 41.975.000,00 | | 60 orang | 41.975.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | Kabupaten Ngawi | 10 orang | | 16.600.000,00 | | 10 orang | 16.600.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|-----------------|------------|--|----------------|--|------------|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Kabupaten Ngawi | 10 orang | | 16.600.000,00 | | 10 orang | 16.600.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | Kabupaten Ngawi | 100 orang | | 124.319.000,00 | | 100 orang | 124.319.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | | 1078 orang | | 118.854.000,00 | | 1078 orang | 118.854.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|--|-----------------|----------|--|---------------|--|----------|---------------|--|
| | | | | | dan Napza di luar Panti Sosial | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | Kabupaten Ngawi | 1 tim | | 53.238.000,00 | | 1 tim | 53.238.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia | Kabupaten Ngawi | 20 paket | | 12.880.000,00 | | 20 paket | 12.880.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | | 20 orang | | | | 20 orang | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|-----------------|----------|--|---------------|--|----------|---------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | Kabupaten Ngawi | 10 orang | | 17.800.000,00 | | 10 orang | 17.800.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Kemitraan pelayanan rehabilitasi sosial di fasilitasi | Kabupaten Ngawi | 10 kali | | 34.936.000,00 | | 10 kali | 34.936.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | | 1 data | | | | 1 data | | |
| | | | | | | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut | | 1 data | | | | 1 data | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|-----------------|-----------|--|-------------------|--|-----------|-------------------|
| | | | | | | usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | | 1 lembaga | | | | 1 lembaga | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | | 55% | | 13.474.663.000,00 | | 55% | 13.474.663.000,00 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah data fakmis yang terbaru | | 1 data | | 13.474.663.000,00 | | 1 data | 13.474.663.000,00 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | Kabupaten Ngawi | 55% | | 550.000.000,00 | | 55% | 550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|-----------------|-------------|--|-------------------|--|-------------|-------------------|--|
| | | | | | | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | | 1 Database | | | | 1 Database | | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | | 4 kali | | | | 4 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat | Kabupaten Ngawi | 43.000 KPM | | 12.539.663.000,00 | | 43.000 KPM | 12.539.663.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | | 150 SDM PKH | | | | 150 SDM PKH | | |
| | | | | | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | | 5.500 KPM | | | | 5.500 KPM | | |
| | | | | | | Jumlah KPM PKH yang memperoleh P2K2 | | 760 KPM PKH | | | | 760 KPM PKH | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|-----------------|------------|--|----------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | | | Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti | | 19 Laporan | | | | 19 Laporan | | |
| | | | | | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | | 75 orang | | | | 75 orang | | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | | 4 kali | | | | 4 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Fakir Miskin mendapatkan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif | Kabupaten Ngawi | 125 orang | | 385.000.000,00 | | 125 orang | 385.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah KPM PKH yang menindaklanjuti Bimtek Wira Usaha | | 25 orang | | | | 25 orang | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|---------------------|------------|--|----------------|--|------------|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase penanganan bencana | | 100% | | 561.250.000,00 | | 100% | 561.250.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | | 100% | | 311.250.000,00 | | 100% | 311.250.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Makanan | Jumlah korban bencana Alam yang mendapatkan makanan | Kabupate n Ngawi | 1500 orang | | 250.000.000,00 | | 1500 orang | 250.000.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang dimiliki | | 10 lokasi | | | | 10 lokasi | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang | | 150 orang | | | | 150 orang | | |
| | | | | | | Jumlah Korban bencana yang menerima Pelayanan Dukungan sosial | | 100 orang | | | | 100 orang | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|-----------------|-----------|--|---------------|--|-----------|---------------|--|
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | | 4 kali | | | | 4 kali | | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | Jumlah Paket Permakanan khusus bagi kelompok rentan | Kabupaten Ngawi | 50 paket | | 61.250.000,00 | | 50 paket | 61.250.000,00 | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | | 50 orang | | | | 50 orang | | |
| | | | | | | Jumlah Orang terlantar yang mendapatkan bantuan | | 60 orang | | | | 60 orang | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok Masyarakat dilokasi rawan Bencana yang mendapatkan | | 50 pokmas | | | | 50 pokmas | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|-----------------|---------|--|----------------|--|---------|--|----------------|--|
| | | | | | | Sosial yang tersedia | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | 6 kali | | | | 6 kali | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | | 100% | | 138.757.700,00 | | 100% | | 138.757.700,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | | 1 TMP | | 138.757.700,00 | | 1 TMP | | 138.757.700,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | Kabupaten Ngawi | 24 kali | | 138.757.700,00 | | 24 kali | | 138.757.700,00 | |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | | 2 kali | | | | 2 kali | | | |

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku- pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kebawah sehingga keterpihakan pada masyarakat kecil benar- benar dikedepankan.

Akhirnya, Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini selesai disusun, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KABUPATEN NGAWI" at the top and "BURATI NGAWI" at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a Garuda bird. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "ONY ANWAR HARSONO".

BURATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO